

Judul : Pemerintah biasa kuasai lagi saham 10 persen
Tanggal : Rabu, 03 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Perpanjangan Kontrak PTFI Pemerintah Bisa Kuasai Lagi Saham 10 Persen



Robert J Kardinal

ANGGOTA Komisi X DPR Robert J Kardinal mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi agar Pemerintah Indonesia dapat kembali menguasai 10 persen saham dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pemerintah bisa saja kembali memperkuat kepemilikan sahamnya menjadi 61 persen jika memperpanjang kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI di tambang Grasberg, Papua.

"Saya kira ini terobosan luar biasa kalau kita bisa kembali menguasai 10 persen saham Freeport, dan saya yakin ini bisa terwujud," kata Robert di Jakarta, kemarin.

Robert mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas dengan penguasaan 51 persen saham di PTFI. Divestasi saham Freeport ini bisa terjadi karena usaha gigih dan keberanian Presiden Jokowi, sehingga perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut mau melepas saham mayoritasnya ke Pemerintah Indonesia.

Jika PTFI mau menyetujui syarat Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan perpanjangan IUPK dengan melepas 10 persen sahamnya, maka Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas dengan total 61 persen.

"Nah, dengan adanya ren-

cana perpanjangan lagi dan beliau (Presiden Jokowi) ingin RI kuasai kembali saham 10 persen, saya anggota DPR dari tanah Papua tentu sangat mendukung itu. Saya kira ini satu hal yang sangat positif dan tentunya seluruh Rakyat Indonesia pasti mendukung itu," ujar politisi Golkar daerah pemilihan Papua Barat ini.

Namun dia meminta, sebelum membahas rencana perpanjangan IUPK PTFI ini, Pemerintah sebaiknya menuntaskan dahulu persoalan jatah saham 10 persen PTFI untuk Pemerintah daerah di Papua. Jatah saham Pemerintah Daerah di Papua ini masih tertahan lantaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua sampai sekarang belum terbentuk.

"Ini kami meminta diselesaikan, jangan sampai karena Pemerintah Daerah tidak memiliki dana untuk mengambil jatah saham 10 persen kemudian menghambat pembangunan di Papua," ujarnya.

Robert menegaskan, saat ini Papua membutuhkan dukungan dana yang besar untuk pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Apalagi saat ini Papua telah dimekarkan menjadi 6 provinsi.

Selain itu, dia berharap rencana Pemerintah untuk menambah 10 persen saham di PTFI melalui perpanjangan IUPK, sebaiknya diperuntukkan bagi daerah, sehingga melalui penambahan saham tersebut, Pemerintah Daerah di Papua memiliki 20 persen saham di PTFI.

"Sebaiknya diberikan langsung kepada Pemerintah Daerah yang 10 persen tambahan itu dan dibuat regulasinya bahwa 10 persen (tambahan saham) ini untuk kesehatan, pendidikan khusus, dan kesejahteraan OAP. Nah ini diberikan untuk seluruh Provinsi yang ada di tanah Papua," harapnya. ■ KAL